

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Hukum Tata Negara**

Oleh :

DEDEN SETIAWAN
NIM. 2323760021

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2025M/1447H**

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Hukum Tata Negara

Oleh :

DEDEN SETIAWAN
NIM. 2323760021

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2025M/1447H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 19650410 199303 1 007

Pembimbing II,



Dr. Amancik, S.H., M.Hum
NIP. 19630517 199001 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. Ismail Jalili, M.A
NIP. 19740618 200901 1 004

Nama : Deden Setiawan
NIM : 2323760021
Tgl. Lahir : 20 September 1988



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul ;

“Analisis Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah “

Penulis :

DEDEN SETIAWAN
NIM. 2323760021

Dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	<u>Prof. Dr. H. Supardi, M. Ag</u> (Ketua/Penguji)	1/09/2025	1.
2	<u>Dr. Adam Nasution, M.Pd.I</u> (Sekretaris)	1/09/2025	2.
3	<u>Prof. Dr. Rohmadi, MA</u> (Penguji I)	1/09/2025	3.
4	<u>Dr. Miti Yarmunida, M.Ag</u> (Penguji II)	1/09/2025	4.

Mengetahui,
Rektor UIN-FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd.
NIP. 19620101 199403 1 005

Bengkulu, September 2025
Direktur PPs UIN-FAS Bengkulu

Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.
NIP. 19640531 199103 1 001

SURAT KETERANGAN PLAGIASI TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir
Mahasiswa Pascasarjana UINFAS Bengkulu

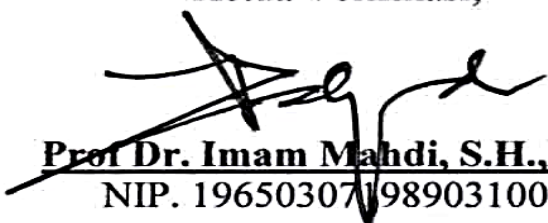
Menerangkan bahwa telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* terhadap Draf Tesis mahasiswa di bawah ini :

Nama : Deden Setiawan
NIM : 2323760021
Program Studi : Pascasarjana HTN
Judul : Analisis Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perspesktif Fiqih
Siyasah

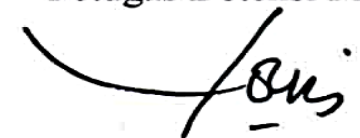
Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi sebesar 11%. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui,
Ketua Verifikasi,


Prof Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 10 Juli 2025
Petugas Deteksi Plagiasi


Dr. Ismail Jalili, M.A
NIP. 19740618 200901 1 004

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan Ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya siap bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Bengkulu, 07 Juli 2025
Saya yang menyatakan,



DEDEN SETIAWAN
NIM. 2323760021

MOTTO

"Hukum yang adil lahir dari suara rakyat dan nurani yang jernih."

"Berpikir ilmiah, berjuang syar'i, demi terwujudnya keadilan yang maslahat."

"Ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk memperjuangkan kebaikan dan kemaslahatan."

"Partisipasi rakyat bukan pelengkap formalitas, tetapi ruh dari demokrasi yang bermartabat."



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

1. **Abah dan Emak tercinta`** Segala doa, kasih sayang, dan perjuangan kalian adalah cahaya dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tiada henti, pengorbanan yang tak terhingga, serta restu yang selalu mengiringi perjalanan ini.
2. **Istri dan anak-anak tersayang.** Kalian adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan yang tiada tergantikan. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan cinta yang selalu mendampingi dalam suka dan duka perjalanan ini.
3. **Saudara-saudaraku tercinta.** Yang selalu menjadi sumber semangat dan penguat di kala letih dan ragu menyapa.
4. **Para Pejabat, rekan-rekan dan teman-teman di kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur.** Yang telah memberikan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tesis ini.
5. **Teman-teman seperjuangan serta Almamater tercinta, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.** Yang turut kebersamai dalam perjalanan panjang ini, dalam tawa, tangis, dan perjuangan. Tempat di mana aku belajar, tumbuh, dan menemukan arah pengabdian.. Semoga karya sederhana ini menjadi amal jariyah, menjadi bagian dari kontribusi kecil untuk kemaslahatan umat dan pembangunan bangsa.

ABSTRAK

Analisis Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah

Penulis :
DEDEN SETIAWAN
NIM. 2323760021

Pembimbing:

- 1) Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag 2) Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah; serta mengkaji implementasi nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi terhadap proses legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam pembentukan Perda, mulai dari pengajuan rancangan hingga pengesahan melalui koordinasi lintas-OPD dan kolaborasi dengan DPRD, mencerminkan komitmen terhadap otonomi daerah yang responsif. (2) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda masih terbatas dan belum optimal. Meskipun tersedia forum konsultasi publik, pelibatan masyarakat lebih bersifat informatif daripada konsultatif, dengan mekanisme yang cenderung top-down dan kurang responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya lokal. (3) Peran pemerintah dan partisipasi dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kaur telah merefleksikan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* melalui musyawarah (pelibatan DPRD dan masyarakat), keadilan (menyeimbangkan kepentingan), dan kemaslahatan (regulasi yang bermanfaat luas bagi masyarakat).

Kata kunci: Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, *Fiqh Siyasah*.

ABSTRACT

An Analysis of the Role of Local Government and Community Participation in the Formation of Regional Regulations in Kaur Regency Based on Law Number 13 of 2022: A Fiqh Siyasaah Perspective

Author:

DEDEN SETIAWAN

Student ID: 2323760021

Supervisors:

1. Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
2. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

This study aims to analyze the role of the Kaur Regency local government in the formulation of regional regulations based on Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation; to assess the level of community participation in the regional legislative process; and to examine the implementation of fiqh siyasah values in the formation of these local regulations. This research employed a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through documentation studies, interviews with relevant stakeholders, and observations of the local legislative process. The findings show that: (1) The role of the Kaur Regency local government in the legislative process—from the drafting stage to enactment—through inter-agency coordination and collaboration with the Regional People's Representative Council (DPRD), reflects a commitment to a responsive regional autonomy. (2) Community participation in the formation of regional regulations remains limited and suboptimal. Although public consultation forums are available, community engagement tends to be more informative than consultative, with mechanisms that are largely top-down and insufficiently responsive to local socio-cultural values. (3) The roles of the government and community in forming regional regulations in Kaur Regency reflect the principles of fiqh siyasah through deliberation (involving DPRD and the community), justice (balancing interests), and public welfare (producing regulations that benefit society broadly).

Keywords: Regional Regulation, Local Government, Community Participation, Law Number 13 of 2022, Fiqh Siyasaah

Valid document
Validated & Verified By :

Deden Setiawan

ملخص

تحليل دور الحكومة والمشاركة المجتمعية في صياغة اللوائح الإقليمية بمحافظة كاور
استنادًا إلى القانون رقم 13 لعام 2022 من منظور الفقه السياسي (الفقه السياسي)

الكاتب:

ديدين ستيوان

رقم التسجيل: 2323760021

تحت الإشراف:

1. أ. د. سوفاردي

2. د. ميتي يارمونيدا

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الحكومة المحلية في محافظة كاور في صياغة اللوائح الإقليمية بناءً على القانون رقم 13 لعام 2022 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 12 لعام 2011 المتعلق بصياغة التشريعات؛ وتقييم مستوى مشاركة المجتمع في العملية التشريعية الإقليمية؛ بالإضافة إلى دراسة تطبيق القيم المستمدة من الفقه السياسي (الفقه السياسي) في صياغة هذه اللوائح. اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي باستخدام مقارنة وصفية تحليلية. تم جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق، والمقابلات مع الأطراف المعنية، وكذلك الملاحظة المباشرة للعملية التشريعية المحلية. أظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) إن دور الحكومة المحلية بمحافظة كاور في صياغة اللوائح - بدءًا من اقتراح المشروع وحتى المصادقة عليه - من خلال التنسيق بين الأجهزة الحكومية والتعاون مع مجلس النواب المحلي (DPRD)، يعكس التزامًا بتحقيق لامركزية إدارية تستجيب للاحتياجات المحلية. (2) لا تزال مشاركة المجتمع في صياغة اللوائح الإقليمية محدودة وغير فعالة بشكل كافٍ. فعلى الرغم من توفر مننديات للتشاور العام، إلا أن إشراك المجتمع يتسم بالطابع الإعلامي أكثر من كونه استشاريًا، حيث تعتمد الآليات المتبعة على النهج التنازلي (Top-Down) ولا تستجيب بشكل كافٍ للقيم الاجتماعية والثقافية المحلية. (3) يعكس دور الحكومة والمجتمع في صياغة اللوائح الإقليمية بمحافظة كاور مبادئ الفقه السياسي، مثل: الشورى (من خلال إشراك مجلس النواب والمجتمع)، والعدالة (بتوازن المصالح)، والمصلحة العامة (بوضع لوائح تعود بالنفع العام على المجتمع).

الكلمات المفتاحية: اللوائح الإقليمية، الحكومة المحلية، المشاركة المجتمعية، القانون رقم 13 لعام 2022، الفقه السياسي

Valid document

Validated & Verified By :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada **Program Studi Hukum Tata Negara, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta dianalisis melalui pendekatan fiqih siyasah dalam khazanah pemikiran politik Islam.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Pascasarjana S2 UINFAS Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Rohimin Alwi, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan, nasihat, serta dorongan dalam penyelesaian thesis ini.

3. Dr. Ismail Jalili, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah (HTN) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, serta dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Amancik, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan masukan konstruktif dan bimbingan yang mendalam.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Studi Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat dengan penuh ketulusan dan keikhlasan
7. Pemerintah Kabupaten Kaur dan pihak-pihak yang telah bersedia menjadi narasumber serta memberikan data dan informasi penting dalam penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan kebersamaan selama masa studi dan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum tata negara dan pemikiran politik Islam di Indonesia.

Bengkulu, 07 Juli 2025

Penulis

DEDEN SETIAWAN
NIM. 2323760021

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Perundang-Undangan.....	20
B. Teori Pemerintah Daerah	24
C. Teori Partisipasi Masyarakat.....	28
D. Teori <i>Good Governance</i>	35
E. Teori <i>Fiqih Siyash</i>	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Sumber Data Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	57
D. Subjek Penelitian.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Teknik Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Kaur	62
B. Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat daerah Kabupaten Kaur dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah	66
1. Peran Pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	66
2. Partisipasi Masyarakat daerah Kabupaten Kaur dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah	69
C. Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kaur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	73
1. Peran Pemerintah Kabupaten Kaur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	73
2. Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kaur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang	

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	79
D. Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kaur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah	85
1. Peran Pemerintah Kabupaten Kaur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	85
2. Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kaur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran-Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	